

**Keputusan Wali Kota Salatiga
Nomor 000.7.2 / 303 / 2025
tentang**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

Lampiran XIX



**DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**



PERUBAHAN RENCANA KERJA 2025

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA SALATIGA**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang berpedoman pada RPD Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023 - 2043;
14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026;
16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025;
17. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga adalah memberikan arah dan pedoman pelaksanaan program kerja dan kegiatan berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga adalah untuk memberikan arah kebijakan dalam mencapai sasaran program kerja dibidang penanaman modal.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2025 disusun dengan penyajian sebagai berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah

Capaian realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga triwulan II Tahun 2025 dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 4.972.689.481,- dan terealisasi sebesar Rp 2.247.289.385,- atau 45,19% yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 4.570.235.661,- (empat miliar lima ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) yang terealisasi sebesar Rp 2.238.389.385,- (dua miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) atau terealisasi 48,97%.

2. Belanja Modal

Pada triwulan II Tahun anggaran 2025 belanja modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota sebesar Rp 22.598.100,- (dua puluh dua juta lima sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus rupiah) atau terealisasi 39,38%.

Sedangkan jika dilihat dari program kegiatan terdiri dari

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar Rp 4.486.235.307,- (empat miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) yang terealisasi sebesar Rp 2.226.556.385,- (dua miliar dua ratus dua puluh enam juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) atau terserap 49,63%.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Anggaran untuk Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebesar Rp 200.870.000,- (Dua ratus juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terealisasi sebesar Rp0,- (nol rupiah) atau sebesar 0,0%.

3. Program Promosi Penanaman Modal

Anggaran untuk Program Promosi Penanaman Modal sebesar Rp 104.728.000,- (Seratus empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang terealisasi sebesar Rp0,- (nol rupiah) atau sebesar 0,0%.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Anggaran untuk program pelayanan penanaman modal sebesar Rp 62.700.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang terealisasi sebesar Rp 6.187.000,- (enam juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atau sebesar 9,87%.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Anggaran untuk program pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebesar Rp 118.156.174,- (seratus delapan belas juta seratus lima puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) yang terealisasi Rp 14.546.000,- (empat belas juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 12,31%.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Anggaran untuk program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebesar Rp 0,- (nol rupiah) yang terealisasi Rp 0,- (nol rupiah) atau sebesar 0,0%.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga triwulan II Tahun 2025 dan capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2023-2026 tersaji pada tabel berikut.

Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga

Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD:

1. Pertumbuhan nilai investasi

2. Prosentase kenaikan jumlah investor

2. Prosentase kenaikan jumlah investor																																			
No	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra)			Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2025			Realisasi TW II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025			Keterangan										
				5			6			7			8			12			13			14													
				K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp			K	Rp								
1	2	3	4				5			6			7			8			12			13			14			15							
		Meningkatnya Capaian realisasi PMA dan PMDN																																	
2.		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																																	
2.18.		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																																	
2.19.1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					84,75																												
			Indeks Kepuasan Masyarakat	90																															
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20.000.000						10			5.000.000			0			-			0,00%			0			9.953.500	50%						
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																										-							
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		12.291.797.000						30			3.377.154.254			30			1.764.770.421			100,00			52,26			30			7.538.359.758	61%			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		29.700.000						30			17.280.000			0			5.719.800			-			0,00%			30			35.419.800	49%			
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																										-							
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								90			22.401.900			75			15.930.000			83,33			71,11			75			33.109.140				
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		-																								-							
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																										-							
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		-						100			38.880.000			100			38.700.000			100,00			99,54			100			38.700.000				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		-						0			-			0			-			0			0,00%			0			-				
		Administrasi Umum Perangkat Daerah																										-							
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		20.400.000						100			10.000.000			50			5.045.000			50,00			0,00%			50			14.124.500	69%			
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		76.500.000						0			13.000.000			0			9.980.300			-			0,00%			0			41.295.700	54%			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		187.000.000						80			34.000.000			30			10.533.400			37,50			30,98			30			81.748.200	44%			
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		109.000.000						48.957.350			30			37.000.000			15			15.337.000			50,00			41,45			15			64.294.350	59%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		28.000.000						15.095.700			30			10.252.500			30			4.565.800			100,00			44,53			30			19.661.000	70%
		Fasilitas Kunjungan Tamu		36.000.000						20.894.000			30			11.000.000			25			3.474.000			83,33			31,58			25			24.368.000	68%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		538.000.000						256.920.237			30			87.717.000			25			33.440.660			83,33			38,12			25			290.360.897	54%
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																										-							
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		245.000.000						- 100			22.598.063			50			8.900.000			50,00			39,38			50			8.900.000	4%			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																										-							
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		26.000.000						5.484.600			30			3.000.000			10			595.900			19,86			100			6.080.500	23%			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2025		Realisasi TW II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		15

No	Sasaran	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra)		Realisasi capaian kinerja Renstra PD sampai dengan Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun 2025		Realisasi TW II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2025)				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		12		13		14		15	
2.18. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL																			
			Prosentase Kenaikan Jumlah LKPM yang masuk	12		39,42													
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			-		9.207.400	30	40.000.000	20	9.885.000	66,67	24,71	30	19.092.400				
		Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usa			1.775.600.000		594.218.500	30	38.156.174	0	2.736.000	-	7,17	0	596.954.500			33,62%	
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			288.455.000		102.626.200	30	40.000.000	20	1.925.000	66,67	4,81	30	104.551.200			36,25%	
		Pengawasan Penanaman Modal																	
2.18.C PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL																			
			Prosentase perizinan dan non perizinan yang dikelola	10		-31,62													
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
		Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizin			400.000.000		86.118.700	0	0	0	-	0	0		86.118.700			21,53%	
					22.683.752.000		9.506.212.322		4.972.686.481		2.247.289.385				11.753.501.707			51,81%	

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan program, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga, tidak terlepas dari perannya dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang penanaman modal dan urusan pelayanan terpadu satu pintu. Hasil pelayanan DPMPTSP dibidang pengelolaan sasaran yang telah ditetapkan melalui RPD 2023-2026 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Selama periode 2024, upaya promosi penanaman modal di Kota Salatiga oleh Pemerintah Kota Salatiga sudah membuahkan hasil. Pada tahun 2024 terdapat 361 investor berskala nasional, baik itu investasi dari dalam negeri (PMDN) maupun dari luar negeri (PMA). Jumlah tersebut naik dari tahun 2023 yang sebanyak 256 investor, naik dari tahun 2022 yang sebanyak 146 investor, setelah sempat turun pada tahun 2020 dan 2021 yang hanya 62 dan 84 investor. Untuk tahun 2025 sampai dengan triwulan II dengan jumlah sebanyak 100 investor

Dari hasil evaluasi antara target kinerja berdasarkan indikator kinerja dan realisasi yang dicapai sampai dengan triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat Indikator Kerja Utama (IKU) antara lain:

- a. Pada indikator pertumbuhan nilai investasi dari target pertumbuhan nilai investasi Tahun 2023 adalah kenaikan sebesar 10%, capaian pertumbuhan nilai investasi sampai dengan tahun 2023 adalah 52,17%. Target pertumbuhan nilai investasi Tahun 2024 adalah kenaikan sebesar 10,22%, capaian pertumbuhan nilai investasi tahun 2024 adalah 6,89%. Sedang pada triwulan I Tahun 2025 capaian pertumbuhan investasi triwulan I 2025 dibanding tahun sebelumnya adalah -67,6%, dengan perhitungan dari perbandingan realisasi nilai investasi pada triwulan I 2025 sebesar Rp 205.464.444.058,- dibanding dengan realisasi investasi tahun 2024 sebesar Rp 634.853.695.566,-.
- b. Pada indikator persentase kenaikan jumlah investor berskala nasional dengan target 2023 adalah naik sebesar 3%, dari sebanyak 146 investor pada tahun 2022 naik menjadi 256 investor pada tahun 2023, sehingga capaian sampai dengan akhir persentase kenaikan jumlah investor berskala nasional Tahun 2023 adalah 75,34% . Pada Tahun 2024 target

- persentase kenaikan jumlah investor berskala nasional adalah 3,5% , dengan capaian persentase kenaikan jumlah investor berskala nasional Tahun 2024 adalah sebesar 41,02% dari sebanyak 256 investor pada tahun 2023 naik menjadi 361 investor pada tahun 2024. Sedang pada tahun 2025 target persentase kenaikan jumlah investor berskala nasional adalah 4% dengan capaian triwulan I sebesar -72,3% dari sebanyak 100 investor pada triwulan I tahun 2025 dibanding dengan 361 investor pada akhir tahun 2024.
- c. Pada indikator prosentase kenaikan nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dengan target tahun 2025 adalah 10,5% , sampai dengan triwulan I tahun 2025 baru tercapai -54,28% dari sebesar Rp 291.967.038.770,- pada tahun akhir 2024 baru tercapai sebesar Rp 133.481.291.369,- pada triwulan I tahun 2025.
 - d. Pada indikator prosentase kenaikan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan target tahun 2025 adalah 10,3% , sampai dengan triwulan I tahun 2025 baru tercapai -79,01% dari sebesar Rp 342.886.656.796,- pada tahun akhir 2024 baru tercapai sebesar Rp 71.983.152.689,- pada triwulan I tahun 2025.
 - e. Pada indikator kinerja nilai investasi, sesuai dengan target dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2023-2026, untuk nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kota Salatiga tahun 2024 adalah sebesar 533,49 miliar rupiah dan sampai dengan akhir tahun 2024 terealisasi sebesar 634,853 miliar rupiah. Pada tahun 2025 target nilai investasi PMA dan PMDN adalah 586,84 miliar rupiah dan baru terelisasi sebesar 205,464 miliar rupiah atau sekitar 35,01%.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga sampai dengan akhir Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana terlampir pada Tabel T-C.30.

Tabel T-C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (tnn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024	Tahun 2024 (tnn n)	Tahun 2025 (thn n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	
1	Pertumbuhan nilai ivestasi (%)		√	10,00	10,22	10,40	10,55	-70,29	52,17	6,89	10,22	10,40		
2	Persentase Kenaikan nilai investasi PMDN (%)			10,00	10,20	10,30	10,25	9,29	76,62	63,36	11,22	11,33		
3	Persentase Kenaikan nilai investasi PMA (%)			10,00	10,25	10,50	10,75	-76,32	43,61	-17,41	11,28	11,55		
4	Persentase Kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) %			3,00	3,50	4,00	5,00	73,81	75,34	41,02	3,85	4,4		

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Salatiga dalam hal pelayanan penanaman modal dan perizinan. Beberapa permasalahan pelayanan perangkat daerah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Proses perizinan yang masih dianggap panjang dan kurang transparan dengan akar permasalahan antara lain:
 1. SOP yang masih dianggap rumit dan panjang.
 2. Tuntutan perizinan terbit secara instan tanpa memperhartikan aturan dan persyaratan yang diperlukan.
 3. Ketergantungan pada Verifikasi Fisik Berlebihan.
 4. Koordinasi antar instansi teknis belum optimal.
- b. Belum adanya peraturan daerah mengenai pemberian fasilitas/ insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kota/kota itu mengindikasikan adanya akar permasalahan sebagai berikut:
 1. Kurangnya Komitmen Politik.
 2. Jumlah SDM yang memiliki berkemampuan dan berkompetensi serta keterbatasan Pengetahuan Hukum dan Ekonomi.
 3. Kurangnya Data dan Analisis untuk merumuskan insentif yang efektif, diperlukan data dan analisis mengenai potensi investasi, sektor prioritas, serta kebutuhan investor.
 4. Kendala Birokrasi dan Koordinasi.

2.3 Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

Proses pembandingan antara perubahan RKPD dengan hasil analisis OPD dilakukan untuk mengetahui apakah perubahan RKPD sudah sesuai dengan kebutuhan OPD dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Rancangan awal perubahan RKPD untuk Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal terdiri dari 5 Program dan 11 Kegiatan. Bahan pertimbangan terhadap rumusan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 adalah seperti yang tertuang dalam dokumen Renstra DPMPTSP Kota Salatiga Tahun 2023 - 2026 yang berfokus pada

pencapaian RPD Kota Salatiga Tahun 2025.

Hal-hal yang telah dilakukan sebelum penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2025 antara lain:

- a. Prioritas pemenuhan Anggaran untuk Gaji 14 bulan dan TPP 13 bulan;
- b. Pemenuhan kekurangan belanja rutin dilakukan dengan pergeseran internal perangkat daerah;
- c. Tidak melakukan dan/atau menambahkan kegiatan FISIK yang baru;
- d. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/FGD;
- e. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%;
- f. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium;
- g. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
- h. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada tahun anggaran sebelumnya;
- i. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa;
- j. Melakukan pergeseran pagu antar sub kegiatan/kegiatan maupun program dengan dengan kriteria:
 - Memperhatikan rencana pencapaian kinerja perangkat daerah;
 - Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar Masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat;
 - Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi pemerintah maupun Masyarakat;
 - Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan Pembangunan daerah;
 - Kegiatan dan/atau sub kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran yang signifikan terhadap pencapaian hasil program.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan pada Rancangan Awal perubahan Renja Tahun 2025 sebagai berikut:

Jumlah Program	: 6 Program
Jumlah Kegiatan	: 14 Kegiatan
Jumlah Sub Kegiatan	: 29 Sub Kegiatan

Pagu RKPD Penetapan : Rp4.592.833.761,-

Pagu Kebutuhan Perubahan Indikatif : Rp5.105.771.791,-

Review terhadap perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut, Tabel T-C.31:

Tabel T-C.31
Review Terhadap RKPD Tahun 2025 DPMPTSP KOTA SALATIGA

Nama Perangkat Daerah: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	Penetapan RKPD Tahun 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA/ KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat	89	3.934.080	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA/ KOTA		Indeks Kepuasan Masyarakat	88	4.687.368	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	5.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	0	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKJip, RTP, LKPD, RENJA, PUG, LPPD, PKT)	7	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKJip, RTP, LKPD, RENJA, PUG, LPPD, PKT)	7	5.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.810.452	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.527.520	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28	2.793.172	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20	3.510.240	Pegawai baru dari luar daerah

Penetapan RKPD Tahun 2025						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2	17.280	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			2	17.280	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				22.402	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				22.402	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan pengamanan bmd	2	22.402	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah laporan pengamanan bmd	2	22.402	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				38.880	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				38.880	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Paket pakaian	1	38.880	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Paket pakaian	1	38.880	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				218.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah				202.969	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang Disediakan	1	10.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	0	

Penetapan RKPD Tahun 2025						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			1	12.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah paket	1	13.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	34.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	34.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	31.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	37.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1	8.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1	10.252	
	Penyediaan bahan/material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	-	Penyediaan bahan/material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	8.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	11.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242	120.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	242	87.717	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				22.598	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				22.598	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang Disediakan	0	0	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang Disediakan	0	0	

Penetapan RKPD Tahun 2025						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	22.598	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	22.598	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				515.648	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				583.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	3.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	3.000	
	Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	113.648	Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	120.000	

Penetapan RKPD Tahun 2025						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	399.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	460.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				231.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				285.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	75.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	85.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	26.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	26.000	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	25	5.000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	25	5.000	

Penetapan RKPD Tahun 2025						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	65.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75	65.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	60.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	100.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN	586,84	200.870	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN	586,84	200.870	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pendukung iklim penanaman modal	2	50.870	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen pendukung iklim penanaman modal	2	50.870	
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		0	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		0	

Penetapan RKPD Tahun 2025						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
NO	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	8	50.870	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	8	50.870	
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2	-	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	2	-	
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peta Potensi	1	150.000	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peta Potensi	1	150.000	
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		0	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		0	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	150.000	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1	150.000	
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Prosentase Kenaikan Jumlah minat Investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	10	104.728	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		Prosentase Kenaikan Jumlah minat Investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	10	104.728	

Penetapan RKPD Tahun 2025						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	3	4 Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN)	5 180	6 104.728	7 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	8	9 Jumlah Investor berskala nasional (PMA/PMDN)	10 180	11 104.728	12
			Jumlah Promosi Penanaman Modal	4				Jumlah Promosi Penanaman Modal	4		
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1	-	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	-	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	104.728	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	104.728	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Prosentase jumlah perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan	93	145.000	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		Prosentase jumlah perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan	92	62.700	
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perijinan dan Non perijinan yang diterbitkan	1722	145.000	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Perijinan dan Non perijinan yang diterbitkan	1538	62.700	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan		Jumlah Pelaku Usaha yang	7501	145.000	Penyediaan Pelayanan Perizinan dan Non		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan	7144	62.700	

Penetapan RKPD Tahun 2025											Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
NO	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)					
1	Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	3	4 Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5	6	7 Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota	8	9 Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10	11	12				
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	110	-	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan	110	-					
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan		Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		-	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko		Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha		-					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan	2	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian	2	-					

Penetapan RKPD Tahun 2025						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah					Fasilitas/Insentif Daerah			
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Prosentase Kenaikan Jumlah LKPM yang masuk	12	118.156	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		Prosentase Kenaikan Jumlah LKPM yang masuk	12	118.156	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKPM yang masuk	273	118.156	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah LKPM yang masuk	273	118.156	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	120	40.000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	120	40.000	
	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	330	38.156	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	330	38.156	
	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang	110	40.000	Pengawasan Penanaman Modal		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang	110	40.000	

Penetapan RKPD Tahun 2025						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
NO	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/SubKegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan					Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan			
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Prosentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola	10	40.000	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Prosentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola	10	0	
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perizinan dan non perizinan yang dikelola	1330	40.000	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah perizinan dan non perizinan yang dikelola	1330	0	
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	1	40.000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha yang diolah dikaji dan dimanfaatkan	1	0	
TOTAL PAGU					4.592.834					5.173.823	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan dari berbagai strategi dan kebijakan dalam rangka mencapai setiap misi, maka langkah operasional harus dituang ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga. Sehingga kegiatan merupakan penjabaran dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi kepala daerah. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, dan tujuan perangkat daerah. Sementara yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang merupakan pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat pemantau dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, maupun outcome sesuai sasaran rencana program dan kegiatan.

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga merupakan program prioritas dalam RPJMD dan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang selanjutnya dijabarkan kedalam rancangan kegiatan. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan Kota Salatiga diukur melalui indikator kinerja, yang ditetapkan dengan target yang akan dicapai per satu tahun periode perencanaan. Adapun target capaian indikator tujuan dan sasaran untuk tahun 2025 dan perubahan pada RKPD 2025 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Perubahan Target 2025
Mewujudkan pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kota Salatiga	Pertumbuhan nilai investasi			%	6,89	10,4	10,4
		Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN	Kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	%	41,8	4	41,8
			Kenaikan nilai investasi PMDN	%	63,36	10,3	63,36
			Kenaikan nilai investasi PMA	%	-17,42	10,5	10,5

Perubahan target indikator tujuan dan sasaran tersebut dilakukan berdasar evaluasi terhadap hasil capaian indikator tujuan dan sasaran tahun sebelumnya, yang menggambarkan kinerja sesungguhnya dari perangkat daerah.

Sementara itu, untuk mengukur keberhasilan pencapaian arah kebijakan pembangunan pemerintah Kota Salatiga dapat diukur secara kuantitatif dari Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah dari setiap aspek dan lokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ada di Kota Salatiga. Lebih lanjut, indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Salatiga. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2025 beserta perubahannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Target Indikator Kinerja Utama Urusan Penanaman Modal
Kota Salatiga Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Perubahan 2025	Kondisi Akhir
Pertumbuhan Nilai Investasi	%	6,89	10,4	10,4	10,55

Pada perubahan tahun 2025 setelah dilakukan evaluasi dengan membandingkan hasil capaian tahun sebelumnya, maka target Indikator Kinerja Utama DPMPTSP masih mengacu pada target yang sama dengan RPJMD dan RKPD tahun 2025.

Target Indikator Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal
Kota Salatiga Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2024	Target 2025	Perubahan 2025	Kondisi Akhir
Kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN)	%	41,8	4,00	41,8	5
Kenaikan nilai investasi PMDN	%	63,36	10,3	63,36	10,35
Kenaikan nilai investasi PMA	%	-17,42	10,5	10,5	10,75

Pada perubahan tahun 2025 setelah dilakukan evaluasi dengan membandingkan hasil capaian tahun sebelumnya, maka target Indikator Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal di perubahan Tahun 2025 masih mengacu pada capaian tahun 2024 untuk capaian yang melampaui target dan menggunakan target yang sama dengan RPJMD dan RKPD tahun 2025 untuk capaian yang tidak memenuhi target.

Perubahan target indikator tersebut tidak merubah esensi pencapaian tujuan program dan kegiatan, namun memperkuat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan melalui penyempurnaan target indikator kinerja ditingkat operasional. Dengan perubahan ini, dimaksudkan untuk peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan secara keseluruhan. Pemilihan kegiatan dilakukan berdasarkan program prioritas, strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga sebagaimana diuraikan pada tabel RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH berikut ini.

TABEL 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Nama Perangkat Daerah:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB IV PENUTUP

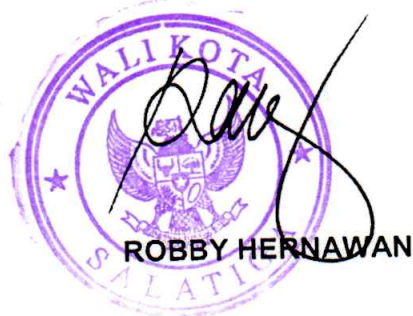
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2023 - 2026. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah yang telah ditetapkan.

Ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan serta pelaksanaan perubahan kegiatan untuk tahun 2025 ini antara lain:

- a. Masih ada kekurangan anggaran untuk gaji sebesar Rp133.082.310,-.
- b. Pada setiap pelaksanaan kegiatan DPMPSTSP berkomitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Perubahan Rencana Kerja ini sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah serta sebagai acuan dalam menyusun perubahan rencana kerja dan program/kegiatan perangkat daerah tahun 2025. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga Tahun 2025 nantinya tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga serta peran aktif stakeholder yang terkait.

WALI KOTA SALATIGA



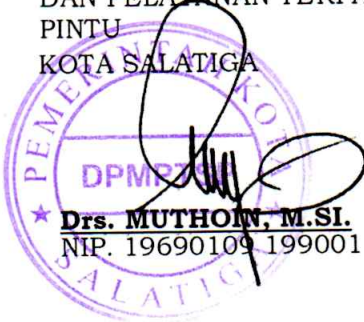
ROBBY HERNAWAN

Formulir
E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengolahan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			

11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Salatiga, 7 Juli 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
KOTA SALATIGA


Drs. MUTHOIN, M.Si.
NIP. 19690109 199001 1 002

Petunjuk Pengisian Formulir E.70:

Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;

Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;

Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;

Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan

Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 000.7.2 / 303 / 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan sistematika terdiri atas:
a. Bab I : Pendahuluan;
b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025;
c. Bab III : Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
d. Bab IV : Penutup.

- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:
- a. Lampiran I : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Lampiran II : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
 - c. Lampiran III : Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Lampiran IV : Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - e. Lampiran V : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. Lampiran VI : Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Lampiran VII : Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. Lampiran VIII : Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Lampiran IX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - j. Lampiran X : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
 - k. Lampiran XI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - l. Lampiran XII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial;
 - m. Lampiran XIII : Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - n. Lampiran XIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - o. Lampiran XV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
 - p. Lampiran XVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - q. Lampiran XVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - r. Lampiran XVIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Lampiran XIX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - t. Lampiran XX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - u. Lampiran XXI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
 - v. Lampiran XXII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
 - w. Lampiran XXIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - x. Lampiran XXIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- y. Lampiran XXV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- z. Lampiran XXVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- aa. Lampiran XXVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- bb. Lampiran XXVIII: Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
- cc. Lampiran XXIX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
- dd. Lampiran XXX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
- ee. Lampiran XXXI : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.

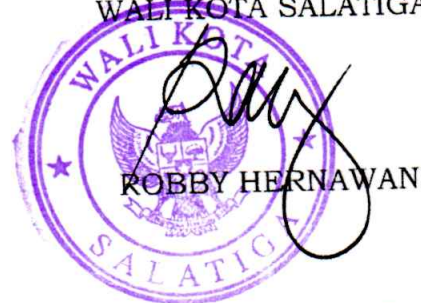
KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 September 2025

WALI KOTA SALATIGA,



Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.